

**STRATEGI PERANG RAKYAT SEMESTA PADA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA****Muchammad Hifni**

Prodi Teknik Elektronika Pertahanan, Akademi Militer
m.hifni@nikelektronikahan.akmil.ac.id

Mei Rinta Sukma Firdaus

Prodi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan
mayrinnta@gmail.com

Azwar Amar Ma'ruf

Prodi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan
azwaramar99@gmail.com

Robby Rahman Assyidiqi

Prodi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan
robby.rahman@sp.idu.ac.id

Frangky Silitonga

Politeknik Pariwisata Batam
frangky@btp.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia, konsep Perang Rakyat Semesta pertama kali diperkenalkan selama perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Konsep ini dipopulerkan oleh Jenderal Sudirman, panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia, yang percaya bahwa militer tidak dapat memenangkan perang sendirian dan bahwa penduduk sipil perlu dimobilisasi untuk mendukung upaya perang. Konsep Perang Rakyat Semesta di Indonesia menekankan pentingnya memobilisasi semua sumber daya yang tersedia, termasuk penduduk sipil, untuk mendukung upaya perang. Hal ini melibatkan integrasi upaya militer dan sipil, dengan penduduk sipil memainkan peran penting dalam mendukung militer. Strategi ini juga menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara penduduk. Perang Rakyat Semesta pada awalnya digunakan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Konsep ini melibatkan semua aspek negara termasuk pemerintah, rakyat dan militer. Ketiga elemen negara tersebut bersatu dalam perang yang kompleks melawan Belanda dan Inggris untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mengakibatkan krisis sosial ekonomi, terutama bagi 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi pandemi Covid-19, seperti pembentukan Satuan Tugas Covid-19. Dalam perjuangan melawan COVID 19, program Jogo Tonggo merupakan gerakan akselerasi. Jogo dan tonggo adalah kata dari bahasa Jawa yang masing-masing berarti penjaga dan tetangga. Keterlibatan militer dilakukan sejak awal penanganan Covid-19 hingga memasuki era new normal. Keterlibatan tersebut memang diperbolehkan dalam konteks operasi militer selain perang (OMS).

Kata-kunci: Perang Rakyat Semesta, Pandemi, Covid-19

THE DYNAMICS OF UNITED STATES PETROLEUM ENERGY POLICY IN THE MIDDLE EAST DURING THE BUSH TO OBAMA PERIOD (2001-2016)

ABSTRACT

In Indonesia, the concept of Total People's War was first introduced during the struggle for Indonesian independence from Dutch colonialism. This concept was popularized by General Sudirman, supreme commander of the Indonesian Armed Forces, who believed that the military could not win the war alone and that the civilian population needed to be mobilized to support the war effort. The concept of Total People's War in Indonesia emphasizes the importance of mobilizing all available resources, including the civilian population, to support the war effort. This involves the integration of military and civilian efforts, with the civilian population playing an important role in supporting the military. This strategy also emphasizes the importance of unity and solidarity among the population. Total People's War was originally used in the Indonesian war of independence. This concept involves all aspects of the country including the government, people and military. These three elements of the country united in a complex war against the Dutch and British to maintain Indonesia's independence. The Covid-19 pandemic in Indonesia has resulted in a socio-economic crisis, especially for the 40% of people with low levels of welfare. The Indonesian government has implemented various steps to combat the Covid-19 pandemic, such as the formation of the Covid-19 Task Force. In the fight against COVID 19, the Jogo Tonggo program is an acceleration movement. Jogo and tonggo are Javanese words that mean guard and neighbor respectively. Military involvement was carried out from the beginning of handling Covid-19 until entering the new normal era. This involvement is permitted in the context of military operations other than war (OMS).

Keywords: *Total People's War, Pandemic, Covid-19.*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, konsep Perang Rakyat Semesta pertama kali diperkenalkan selama perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Konsep ini dipopulerkan oleh Jenderal Sudirman, panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia, yang percaya bahwa militer tidak dapat memenangkan perang sendirian dan bahwa penduduk sipil perlu dimobilisasi untuk mendukung upaya perang. Konsep Perang Rakyat Semesta di Indonesia menekankan pentingnya memobilisasi semua sumber daya yang tersedia, termasuk penduduk sipil, untuk mendukung upaya perang. Hal ini melibatkan integrasi upaya militer dan sipil, dengan penduduk sipil memainkan peran penting dalam mendukung militer. Strategi ini juga menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara penduduk.

Saat ini, konsep Perang Rakyat Semesta terus menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional Indonesia, terutama dalam pendekatan negara terhadap ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme dan bencana alam. Konsep ini menekankan perlunya pendekatan keamanan yang menyeluruh terhadap masyarakat, dengan semua sektor masyarakat bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Covid-19, yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengimplementasikan respons negara terhadap pandemi. Gugus Tugas ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, penyedia layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif.

Konsep Perang Rakyat Semesta juga menekankan pentingnya persatuan

dan solidaritas di masa krisis. Di Indonesia, hal ini diwujudkan dalam berbagai cara, seperti kelompok-kelompok gotong royong yang memberikan bantuan makanan dan medis kepada mereka yang membutuhkan, serta individu dan organisasi yang menyumbangkan sumber daya untuk mendukung upaya pemerintah. Adopsi konsep Perang Rakyat Semesta oleh Indonesia dalam menanggapi Covid-19 menyoroti pentingnya pendekatan seluruh masyarakat untuk mengatasi krisis kesehatan masyarakat. Konsep ini menekankan perlunya tindakan kolektif dan kerja sama di antara semua sektor masyarakat untuk memerangi pandemi secara efektif.

COVID-19 dapat dianggap sebagai bentuk musuh non-militer bagi suatu negara karena penyakit ini menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan keamanan nasional, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. COVID-19 bukanlah musuh yang dapat dihadapi dengan kekuatan militer, tetapi membutuhkan strategi yang berbeda, seperti pembatasan mobilitas, pengawasan kesehatan masyarakat, dan pembatasan aktivitas ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan banyak negara mengalami krisis kesehatan yang parah, yang membutuhkan koordinasi antar negara dan kerja sama internasional yang kuat untuk mengatasinya. COVID-19 juga berdampak pada ekonomi dan sosial budaya global, dimana banyak negara mengalami penurunan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan kerusakan struktur sosial budaya.

Mengatasi wabah COVID-19 membutuhkan upaya kolaboratif dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Pemerintah perlu melakukan tindakan terkoordinasi untuk menangani pandemi secara efektif, seperti memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan pengawasan dan pengujian, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang

terdampak. Sementara itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dengan mematuhi protokol kesehatan, mengikuti instruksi pemerintah, dan saling membantu dalam memerangi pandemi. Untuk menghadapi musuh non-militer seperti COVID-19, penting bagi sebuah negara untuk memiliki strategi yang efektif dan terkoordinasi, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Kerja sama antar negara juga diperlukan untuk mengatasi pandemi ini secara global.

2. LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perang Semesta

Perang Rakyat Semesta dimaksudkan untuk perang gerilya, dengan cara ini unit militer rakyat akan diperoleh untuk perlawanan rakyat secara total. Pasukan rakyat dan tentara memiliki kolaborasi yang tepat untuk melawan musuh dalam perang. Nasution menjadi terbiasa dengan perang gerilya melalui keterlibatannya dalam perang kemerdekaan Indonesia dari Belanda, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949. Nasution membantu mengembangkan rencana militer yang, meskipun tidak memenangkan perang kemerdekaan itu sendiri, namun sangat penting dalam memaksa Belanda untuk mundur. Taktik ini disebut sebagai "Perang Rakyat Semesta" oleh Nasution, yang juga meletakkan sebuah ideologi dalam Dasar-Dasarnya yang mengingatkan para pemikir perang rakyat lainnya di Asia. Beliau mengatakan bahwa yang berperang adalah rakyat, bukan hanya tentara. Rakyatlah yang berperang, memutuskan perdamaian, dan menyusun angkatan bersenjata mereka sendiri. Selalu ingatlah bahwa komandan militer seperti ujung tombak rakyat dan diarahkan oleh rakyat. Itulah mengapa tentara sekarang adalah tentara rakyat dan bukan lagi entitas yang terpisah (Cribb, 2001: 145).

Dalam menggambarkan perjuangan sebagai perang rakyat

semesta, Nasution tidak menyarankan agar seluruh rakyat ikut berperang. Sembilan puluh delapan persen penduduk, katanya, hanya membantu dan mendorong mereka yang melakukan pertempuran yang sebenarnya. Yang penting adalah hubungan organik antara gerilyawan dan rakyat yang diperjuangkannya: pejuang gerilya adalah pejuang perjuangan ideologi rakyat yang hidup di hati rakyat. Jika fondasi dan akar ideologis tidak ada, tidak akan ada dukungan untuk perang gerilya. Tentara gerilya berakar sepenuhnya di dalam jiwa rakyat, dan oleh karena itu, gerakan gerilya hanya dapat berhasil jika rakyat menjadi fondasinya.

Perang Rakyat Semesta pada awalnya digunakan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Konsep ini melibatkan semua aspek negara termasuk pemerintah, rakyat dan militer. Ketiga elemen negara tersebut bersatu dalam perang yang kompleks melawan Belanda dan Inggris untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Ketiga elemen tersebut sama dengan istilah Tritunggal dalam buku Clausewitz, *On War*. Konsep Tritunggal Clausewitz mengacu pada tiga faktor yang terlibat dalam perang: rakyat, pemerintah, dan militer. Clausewitz menganggap bahwa keberhasilan dalam perang tergantung pada interaksi antara ketiga faktor tersebut, dan bahwa perang tidak dapat dipahami atau dimengerti dengan baik jika hanya satu faktor saja yang dianalisis. Menurut Clausewitz, rakyat merupakan faktor penting dalam perang karena mereka memberikan dukungan dan sumber daya bagi pemerintah dan militer dalam menjalankan perang. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peran dalam membentuk strategi perang dan menentukan tujuan perang. Militer, sebagai faktor ketiga, bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Clausewitz menyadari bahwa interaksi antara ketiga faktor ini sangat kompleks dan dapat berubah

tergantung pada situasi. Sebagai contoh, ketika rakyat merasa terancam oleh musuh, mereka mungkin akan memberikan dukungan yang lebih besar kepada pemerintah dan militer dalam menjalankan perang. Namun, jika perang berlangsung terlalu lama atau memakan terlalu banyak korban, dukungan rakyat dapat menurun.

Dalam Konsep Tritunggal Clausewitz, keberhasilan dalam perang bergantung pada kemampuan pemerintah dan militer untuk memahami interaksi antara ketiga faktor tersebut dan menyesuaikan strateginya sesuai dengan situasi yang berubah. Clausewitz menganggap bahwa seluruh situasi perang harus dipahami secara komprehensif dan faktor-faktor yang terlibat dalam perang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, dalam pembahasan Perang Rakyat Semesta Indonesia melawan COVID19, akan diuraikan berdasarkan peran pemerintah, rakyat, dan militer. COVID19 bukanlah musuh militer namun di Indonesia, penanganannya dilakukan secara total dengan menggunakan 3 elemen negara tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan menyelidiki tentang strategi yang dilakukan oleh seluruh aspek bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Metode kualitatif adalah metode yang melibatkan analisis dan interpretasi data serta studi pustaka dan observasi untuk menemukan pola deskriptif yang bermakna dari fenomena tertentu. Namun Peneliti akan menggunakan studi pustaka dalam mengumpulkan data terkait topik permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Aspek Sosial untuk Solusi Pandemi Covid-19

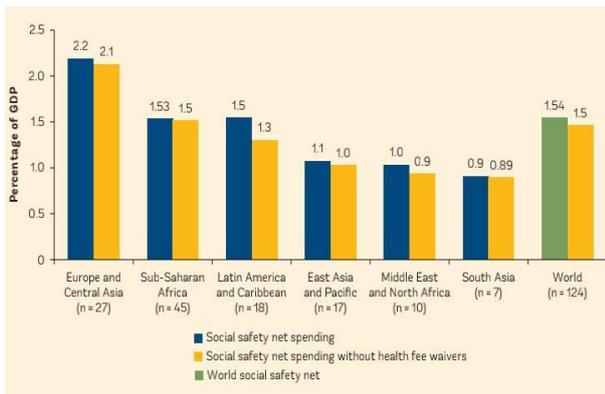
Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mengakibatkan krisis sosial ekonomi, terutama bagi 40%

masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Sehingga diperlukan upaya respon dari pemerintah suatu negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19, dimana Jaring Pengaman Sosial Global (JPS) menjadi salah satu kebijakan dan tantangan yang sangat perlu diperhatikan oleh seluruh negara anggota G20, termasuk Indonesia. JPS merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai stimulus fiskal yang ekstensif dalam menangani kasus Covid-19 sekaligus mencegah terjadinya krisis ekonomi. Arah kebijakan JPS meliputi; kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja produktif, pengembangan usaha kecil dan menengah, dan ketahanan pangan (Sumodiningrat, 1998: 5). Jaring Pengaman Sosial (JPS) muncul di Asia Tenggara sejak krisis keuangan Asia. Istilah Jaring Pengaman Sosial (JPS) mulai digunakan sejak Bretton Woods sehubungan dengan program penyesuaian struktural yang berkaitan dengan program pinjaman yang diluncurkan pada saat itu. JPS pada awalnya diformulasikan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu pengentasan kemiskinan melalui penciptaan program penyesuaian reformasi yang lebih politis dan dapat diterima (Paitoonpong et al., 2008: 467-8).

Bank Dunia (2020: 12) menjelaskan bahwa rata-rata JPS mentransfer 19% kesejahteraan masyarakat termiskin. Namun, tingkat transfer sangat bervariasi antar instrumen program JPS dan antar negara. Perbedaan ini mencerminkan - sebagian - perbedaan tujuan program dan tingkat transfer nilai yang ditangkap dalam survei rumah tangga. Tingkat manfaat relatif program JPS adalah yang terendah, yaitu 13% dari kesejahteraan penerima manfaat bagi masyarakat termiskin di negara-negara berpenghasilan rendah. Secara rata-rata, bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bagian dari kesejahteraan penerima manfaat bagi masyarakat termiskin mencapai 19%. Terdapat

beberapa bukti dari UCT bahwa program pengentasan kemiskinan cenderung memiliki tingkat manfaat yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan pada contoh program bantuan sosial yang ditargetkan (TSA) di Georgia dan Dukungan Langsung dari Program Visi 2020 Uasenge (VUP) di Rwanda. Pada kedua kasus tersebut, manfaatnya mencapai 49% dari kesejahteraan masyarakat termiskin.

Pelaksanaan JPS tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi baik di tingkat individu, kelembagaan (entitas), maupun sistem (Ananta & Siregar, 1999: 13). Permasalahan di tingkat individu adalah kurangnya pemahaman para pelaku tentang safeguarding, serta kurangnya jaminan dan kesungguhan para pelaku untuk melaksanakan mekanisme tersebut (Moffit, 2013: 149). Sementara Korea secara tradisional sangat bergantung pada dukungan internal, JPS telah dikembangkan lebih lambat di negara-negara anggota OECD selain Korea. Sebagai contoh, Sistem Pensiun Nasional didirikan pada tahun 1988 dan Sistem Asuransi Ketenagakerjaan diperkenalkan pada tahun 1995. Namun, karena reformasi sistem, banyak individu yang tidak memenuhi persyaratan dapat mengakses manfaat dari program bantuan yang ada. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan bantuan sosial, terutama sejak krisis keuangan Asia tahun 1997 yang menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan riil. Pada tahun 1999, pemerintah Korea memberlakukan kerangka kerja baru untuk bantuan sosial berdasarkan konsep "kesejahteraan produktif" yang berusaha meningkatkan keberlanjutan ekonomi dari sistem kesejahteraan dengan mengurangi inefisiensi administratif, sementara secara bersamaan meningkatkan kecukupan tunjangan dan mempertahankan insentif keuangan untuk menghindari munculnya pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. (OECD, 2000: 121).



Gambar 1 Rata-rata Pengeluaran Global dan Regional untuk Program Jaring Pengaman Sosial (Sumber : ASPIRE, 2017)

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar 110 triliun untuk program JPS untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Keberadaan program perlindungan sosial menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia sejak krisis keuangan Asia tahun 1997, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tetap mendapat akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (www.smeru.or.id., 2020). Pemerintah Indonesia telah menawarkan berbagai bentuk bantuan sosial, seperti: Program Keluarga Harapan (PKH); Program Pangan Pokok; Bantuan Sosial Langsung; Bantuan Presiden; Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan); Bantuan Listrik Gratis; dan BLT Dana Desa. Namun, beberapa program tersebut tidak berjalan efektif dan menuai banyak kritik sehingga mereka menganggap program tersebut gagal. Menurut penulis, program tersebut belum sepenuhnya gagal, namun penulis merujuk pada kata permasalahan yang ada pada implementasi program JPS itu sendiri. Sehingga dampak yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan yang diharapkan karena terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam proses pelaksanaan program JPS itu sendiri. Berikut rincian program JPS

yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19:

4.1.1 Peran Pemerintah

Epidemi Covid-19 telah berdampak pada Indonesia, dan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah ini. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sebuah organisasi yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan upaya memerangi epidemi, merupakan salah satu inisiatif yang menonjol (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan terdiri dari pejabat dari sejumlah departemen pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia (Tentara Dunia). Organisasi Kesehatan, 2022). Satgas ini telah memainkan peran penting dalam implementasi beberapa langkah, termasuk pembukaan rumah sakit baru dan fasilitas isolasi, penyediaan tes Covid-19 gratis, dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di wilayah tertentu (Irsadanar & Irfanuddin, 2020).

Pemerintah telah memberikan alat pelindung diri tambahan kepada para profesional kesehatan, seperti masker dan sarung tangan, untuk membantu upaya mereka memerangi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga telah memberikan pelatihan tambahan kepada para profesional kesehatan sehingga mereka dapat menangani kasus-kasus Covid-19 dengan cara yang aman dan efisien. Pemerintah juga telah memberikan insentif keuangan dan gaji tambahan kepada para profesional kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Sektor swasta di Indonesia juga telah membantu memerangi Covid-19 dengan menyumbangkan berbagai hal seperti makanan, perlengkapan medis, dan uang tunai. Beberapa bisnis juga telah beralih ke produksi pasokan medis seperti masker dan pembersih tangan. Masyarakat umum juga membantu melawan pandemi ini

dengan memberikan berbagai donasi, termasuk makanan, peralatan perlindungan, dan dukungan finansial bagi para profesional medis. Berkat dukungan ini, semangat para profesional kesehatan meningkat sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan penting mereka dalam menghadapi pandemi ini (Pradana dkk., 2020).

Kesimpulannya, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi pandemi Covid-19, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Seiring dengan peningkatan peralatan pelindung, pelatihan, dan insentif keuangan, pemerintah juga memberikan dukungan kepada para profesional kesehatan. Selain sektor pemerintahan dan korporasi, masyarakat umum telah membantu memerangi epidemi ini dengan memberikan uang dan mendukung para profesional medis.

4.1.2 Peran Masyarakat

Dalam perjuangan melawan COVID 19, program Jogo Tonggo merupakan sebuah gerakan akselerasi. Jogo dan tonggo adalah kata dari bahasa Jawa yang masing-masing berarti penjaga dan tetangga. Mencakup jaring ekonomi dan keamanan sosial dan fisik, yang merupakan dua komponen penting. Kelompok tugas kesehatan, sosial dan keamanan, ekonomi, dan sektor hiburan difokuskan untuk menyatukan individu dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19. Menggabungkan upaya dengan organisasi pemuda, dasa wisma, posyandu, Linmas, warga tingkat Rukun Warga (RW), dan kelompok lainnya. Masyarakat Jawa Tengah lah yang terlibat dalam gerakan ini. Dengan adanya edukasi dan keterbukaan informasi di tengah tren literasi digital saat ini, mata kuliah ini berupaya untuk memajukan masyarakat di tingkat rukun tetangga di setiap desa di Jawa Tengah (Yuliyanto & Winarni, 2022).

Jogo Tonggo merupakan salah satu gerakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19

yang bertujuan untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran virus di lingkungan sekitar. Gerakan ini dilakukan dengan melibatkan warga di tingkat lingkungan seperti RT/RW, tokoh lingkungan, serta masyarakat sekitar.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat melalui gerakan Jogo Tonggo, antara lain:

1. Memiliki komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak sosial.
2. Memberikan informasi akurat mengenai Covid-19 dan cara pencegahannya kepada sesama warga di lingkungan sekitar.
3. Menggalang dana dan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan, seperti warga terdampak Covid-19 atau tenaga medis yang berada di garda depan.
4. Menjalinkan komunikasi dengan pihak berwenang jika terdapat kasus positif Covid-19 di lingkungan sekitar, sehingga dapat dilakukan tindakan cepat dan tepat untuk mencegah penyebaran virus tersebut (Yuliyanto & Winarni, 2022).

4.1.3 Peran Militer

Di Indonesia, keterlibatan militer sudah dilakukan sejak awal penanganan Covid-19 hingga memasuki era new normal. Keterlibatan tersebut memang diperbolehkan dalam rangka operasi militer selain perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam UU No.34/2004 tentang TNI. Menurut Marina Ika Sari dkk (2020), keterlibatan militer secara spesifik dapat dilihat pada peran militer di bidang kesehatan sebagai berikut:

1. TNI melakukan refocusing atau realokasi anggaran sebesar Rp. 196,8 miliar yang bersumber dari kebutuhan anggaran jajaran TNI untuk membantu penanggulangan COVID-19. Dari total anggaran tersebut, dialokasikan untuk pengadaan peralatan laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) dan

reagen kit khusus virus corona, pengadaan alat pelindung diri (APD), test kit dan swab dengan keperluan smart helmet serta peningkatan pengadaan kesehatan. fasilitas seperti ruang isolasi, pengadaan bahan baku hand sanitizer, vitamin, ventilator dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.

2. TNI berkontribusi membantu penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti RS rujukan khusus COVID-19 antara lain RS Angkatan Laut Mintoharjo dan RSPAD Gatot Subroto. Saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3,2 triliun untuk pengerahan pasukan TNI untuk percepatan penanganan pandemi corona selama 150 hari. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas 109 fasilitas pelayanan kesehatan milik tiga matra di seluruh wilayah.

3. Dari sisi sumber daya manusia di bidang kesehatan, TNI menyiapkan tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, dan tenaga penunjang lainnya untuk menangani pasien COVID-19. Salah satu contohnya adalah dokter militer (dokter umum dan spesialis), perawat, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non medis yang ditempatkan di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet untuk merawat pasien yang terinfeksi virus corona.

4. Dari segi logistik, TNI juga membantu pemerintah dalam pendistribusian APD ke berbagai daerah. Pembagian APD ini bertujuan untuk membantu mengatasi keterbatasan APD bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.

5. TNI membantu pemerintah dalam pelacakan intelijen medis seperti pengambilan sampel secara masif, penelusuran & pelacakan kontak yang agresif, dan karantina yang ketat untuk menekan penyebaran COVID19.

6. Dalam hal penelitian dan pengembangan (Litbang), TNI bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan pembuatan vaksin, serum atau obat yang dapat menangkal COVID-19 di Laboratorium Kesehatan Militer.

4.1.4 Kombinasi Peran Stakeholder

Krisis Covid 19 berpotensi menjadi lebih buruk sehingga setiap orang, daerah, atau negara harus berusaha berjuang sendiri-sendiri karena hal ini berdampak sama terhadap semua wilayah dan negara. Karena semua orang terkena dampaknya, premis mendasarnya adalah bahwa daya dukung yang berasal dari luar sistem terbatas, sehingga memerlukan tingkat fleksibilitas atau ketahanan yang tinggi agar peradaban kelompok dapat bertahan. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berhenti, maka kita harus mengembangkan perlawanan yang sistematis, meluas, dan kuat dalam jangka panjang agar sumber daya pemerintah yang relatif terbatas tidak cepat habis jika opsi PSBB diterapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun metode pemberantasan yang lebih metodis dan sepenuhnya bergantung pada kekuatan kolaborasi masyarakat sehingga gugus tugas yang dibentuk di tingkat desa paling bawah memiliki kepemilikan atas aturan pelaksanaan di desa/RW/. tingkat komunitas (Nagara et al., 2020).

Gerakan Kampung Tangguh merupakan inisiatif berbasis komunitas yang didirikan di Indonesia sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Gerakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, tokoh masyarakat, relawan, pelaku usaha lokal, dan masyarakat itu sendiri. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk membangun ketahanan dan memitigasi dampak pandemi di tingkat akar rumput. Gerakan Kampung Tangguh terdiri dari berbagai kegiatan dan inisiatif, termasuk kampanye tentang praktik kebersihan dan kesehatan, memastikan ketahanan pangan, pendidikan tentang COVID-19, dan mendorong pemberdayaan ekonomi. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat dan membangun ketahanan jangka panjang terhadap tantangan masa depan (Mubaroq & Ulfia, 2022). Untuk mengatasi tantangan pandemi ini, gerakan Kampung Tangguh mengandalkan kolaborasi dan

partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara memadai dan intervensi disesuaikan dengan konteks spesifik masing-masing masyarakat. Dengan menumbuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, gerakan Kampung Tangguh menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat, yang selanjutnya memperkuat ketahanan masyarakat. Manfaat gerakan Kampung Tangguh sangat banyak. Pertama, hal ini membantu membangun ketahanan masyarakat dan mengurangi dampak pandemi terhadap kelompok rentan. Kedua, hal ini mendorong kohesi sosial dan memperkuat hubungan masyarakat, yang sangat penting pada saat krisis. Ketiga, menciptakan platform kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan mendorong inovasi dalam menanggapi tantangan yang muncul (Mubarq & Ulfia, 2022).

Dalam Gerakan Tangguh Kampung, berbagai pihak dapat terlibat, antara lain:

1. Pemerintahan Desa/Kampung: Kekuatan utama yang melatarbelakangi gerakan ini adalah pemerintah desa/kampung. Mereka bertugas mengatur semua tindakan yang diambil sepanjang revolusi ini.
2. Tokoh Masyarakat: Tokoh masyarakat berperan penting dalam menggalang masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kampanye ini.
3. Relawan: Relawan adalah orang-orang yang secara sukarela memberikan waktu dan tenaganya untuk mendukung kegiatan gerakan tangguh desa. • TNI/Polri/Lembaga Keamanan: memastikan pelaksanaan gerakan Kampung Tangguh sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
4. Pelaku Usaha Lokal: Pelaku usaha lokal dapat membantu dengan menyediakan makanan, kebutuhan pokok, dan dukungan lainnya kepada masyarakat.
5. Komunitas: Elemen terpenting dalam gerakan desa yang tangguh adalah

komunitas. Mereka diharuskan berpartisipasi aktif dalam tugas-tugas yang dilakukan, seperti menegakkan standar kebersihan, menjalankan prosedur keselamatan, dan mendukung upaya tanggap pandemi.

Selain itu, Gerakan Tangguh Kampung mempunyai mitra yang dapat menawarkan bantuan dalam bentuk sumber daya termasuk bangunan, peralatan, dan uang. Mitra-mitra ini bisa berupa perusahaan nirlaba, kelompok nirlaba, atau badan pemerintah daerah (Nagara et al., 2020).

5. PENUTUP

Mengatasi wabah COVID-19 memerlukan upaya kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Pemerintah perlu mengambil tindakan terkoordinasi untuk menangani pandemi ini secara efektif, seperti memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan pengawasan dan pengujian, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. Sementara itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dengan mematuhi protokol kesehatan, mengikuti instruksi pemerintah, dan saling membantu dalam melawan pandemi. Untuk menghadapi musuh non-militer seperti COVID-19, penting bagi suatu negara untuk memiliki strategi yang efektif dan terkoordinasi, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi. Kerjasama antar negara juga diperlukan untuk mengatasi pandemi ini secara global.

Perang Rakyat Semesta awalnya digunakan dalam perang kemerdekaan di Indonesia. Konsep tersebut melibatkan seluruh aspek suatu negara termasuk pemerintah, rakyat dan militer itu sendiri. Ketiga unsur negara tersebut bersatu dalam perang yang kompleks melawan Belanda dan Inggris demi mempertahankan Indonesia merdeka. Ketiga unsur tersebut sama dengan istilah Trinitas dalam buku *On War* karya Clausewitz. Konsep Tritunggal Clausewitz mengacu pada

tiga faktor yang terlibat dalam perang: rakyat, pemerintah, dan militer.

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mengakibatkan krisis sosial ekonomi, terutama bagi 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi pandemi Covid-19, seperti pembentukan Satuan Tugas Covid-19. Dalam perjuangan melawan COVID 19, program Jogo Tonggo merupakan gerakan akselerasi. Jogo dan tonggo adalah kata dari bahasa Jawa yang masing-masing berarti penjaga dan tetangga. Keterlibatan militer dilakukan sejak awal penanganan Covid-19 hingga memasuki era new normal. Keterlibatan tersebut memang diperbolehkan dalam konteks operasi militer selain perang (OMS).

Krisis Covid 19 berpotensi menjadi lebih buruk sehingga setiap orang, daerah, atau negara harus berusaha berjuang sendiri-sendiri karena hal ini berdampak sama terhadap semua wilayah dan negara. Karena semua orang terkena dampaknya, premis mendasarnya adalah bahwa daya dukung yang berasal dari luar sistem terbatas, sehingga memerlukan tingkat fleksibilitas atau ketahanan yang tinggi agar peradaban kelompok dapat bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris & Reza Siregar. 1999. *Social Safety Net Policies in Indonesia: Objectives and Shortcomings*. Dalam *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 16, No. 3, hal. 344-359.
- ASPIRE. 2017. *Atlas of Social Protection: Indicators of Resilience and Equity*. [Daring]. Tersedia dalam <http://datatopics.worldbank.org/aspire/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Langkah Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19*. [Daring]. Tersedia dalam <https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. *Jaring Pengaman Sosial Disiapkan untuk atasi Dampak Covid-19*. [Daring]. Tersedia dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/jaring_pengaman_sosial_disiapkan_pemerintah_untuk_atasi_dampak_covid_19. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020.
- Moffit, Robert A. 2013. *The Great Recession and the Social Safety Net*. *The Annals of the American Academy*, AAPSS, 650, hal. 143-165.
- Mubarok, H., & Ulfia, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tangguh Semeru Wirosecang Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo. *Abdimas Galuh*, 4(1), 22. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.6511>
- Nagara, A. Y., Prawestiningtyas, E., Putri, A. D. J. J., Putri, F. R., Nurwanti, R., Purnomo, M., Santoso, B., Yuda, A., Permadi, H., Galang, H., Prasetyo, R. E., Pranowo, D., Anwar, K., Nugroho, T. W., Zamroni, M., Hadi, M. S., Yusuf, N., Ainun, Y., Sudarmaji, ... Sunarto, B. P. (2020). *Pedoman Pengoperasian Kampung Tangguh: Langkah sistemik melawan Pandemi Covid 19*. *Gugus Tugas Covid 19 Kampung Tangguh*, 1-14. <https://kampungtangguh.ub.ac.id/landing/#prosedur>
- OECD. 2000. *Pushing Ahead with Reform in Korea: Labour Market and Social Safety-Net Policies*.
- Paitoonpong, Sravoth et al. 2008. *The Meaning of "Social Safety Nets"*. Dalam *Journal of Asian Economics*, 19. Thailand: Thailand

- Development of Asian Institute, hal. 467-473.
- Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2), 189.
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>
- Smeru. 2020. *Jaring Pengaman Sosial dalam Krisis Covid-19: Apa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah?*. Jakarta: The Smeru Research Institute.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Stabilisasi Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial: Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Makalah disampaikan pada diskusi di Pusat Penelitian Pembangunan Perdesaan dan Kawasan (P3PK) UGM, 10 September 1998.
- World Bank. 2018. *The State of Social Safety Nets 2018*. Washington D.C.: World Bank Group, hal. 1-24.
- Cabinet Secretary of The Republic of Indonesia. (2022). *COVID-19 Task Force Issues New Circular on Health Protocols for International Travel*. Cabinet Secretary of The Republic of Indonesia.
<https://setkab.go.id/en/covid-19-task-force-issues-new-circular-on-health-protocols-for-international-travel/>
- Irsadanar, R. J. P., & Irfanuddin, M. A. (2020). *Indonesian "Total People's Defense" Against Corona Virus*. ASEAN STUDIES CENTER.
<https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2020/05/21/indonesian-total-peoples-defense-against-coronavirus/>
- Pradana, M., Rubiyanti, N., S, W., Hasbi, I., & Utami, D. G. (2020). Indonesia's fight against COVID-19: the roles of local government units and community organisations. *Local Environment*, 25(9), 741-743.
<https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1811960>
- World Health Organization. (2022). *World Health Organization - Indonesia*. WHO.
<https://www.who.int/countries/indonesia/>
- Yuliyanto, I. M., & Winarni, A. T. (2022). Partisipasi Masyarakat Pada Program Jogo Tonggo Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 63-68.